



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023



**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Isu-isu Strategis	2
1.3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	5
1.3.1. Mandat Kinerja	5
1.3.2. Peta Proses Bisnis	10
1.3.3. Struktur Organisasi	11
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	14
1.5. Sistematika Penulisan	15
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023	16
1.7. Langkah Perbaikan Internal OPD	17
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Perjanjian Kinerja	19
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB III	23
AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
3.2. Realisasi Anggaran	33
3.1 INOVASI	33
3.2 PENGHARGAAN	34
BAB IV	37
PENUTUP	37
4.1. KESIMPULAN	37
4.2. REKOMENDASI	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . 1 CASCADING BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH.....	5
Tabel 1 . 2 DATA PEGAWAI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH	14
Tabel 1 . 3 DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA	14
Tabel 1 . 4 SARAN / REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023	16
Tabel 1 . 5 TINDAK LANJUT/RENCANA AKSI SARAN REKOMENDASI PADA LKjIP TAHUN SEBELUMNYA	17
Tabel 2 . 1 KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA.....	18
Tabel 2 . 2 KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA,.....	19
Tabel 2 . 3 KETERKAITAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
Tabel 2 . 4 KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . 1 PETA PROSES BISNIS BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH.....	10
Gambar 1 . 2 STRUKTUR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.....	13
Gambar 3 . 1 SIMAPAN SDM SEBAGAI BENTUK INOVASI.....	34
Gambar 3 . 2 Menerima penghargaan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi kategori bintang 1 dari (LAN-RI)	35
Gambar 3 . 3 Pencapaian standar ISO 21001:2018 pada tanggal 11 Oktober 2023 oleh Lembaga akreditasi TUV Nord	35
Gambar 3 . 4 Juara kedua tingkat nasional Kategori Adaptive Learning Strategy Dengan Tema “Pengembangan Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Klasifikasi Pemerintah Daerah” oleh LAN-RI	35
Gambar 3 . 5 Penghargaan sebagai lembaga pendidikan yang bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan akselerasi pelatihan struktural kepemimpinan pegawai (PKA/PKP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi oleh Kemenkumhuk RI.....	36
Gambar 3 . 6 Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik Awards Tahun 2023 kategori Informatif Dalam Menyampaikan, Menyediakan, dan Menguasai Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	36


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Rancangan Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Semarang, 31 - 01 - 2024
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan nasional dan daerah, serta pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat sekaligus menjadi *Problem Solving* atas permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah, diperlukan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang berkualitas, memiliki integritas dan profesionalisme, serta berkompeten dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam suatu Organisasi Pemerintah. Segala potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk upaya dalam meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut juga selaras dalam kebutuhan sebuah negara dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya strategis yang berperan menunjang kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam pasal 11 disebutkan bahwa tugas utama pegawai ASN salah satunya adalah "Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas".

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang menjadi kewenangan daerah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibentuk untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang prima (*Excellence Public Service*). Oleh karena itu, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator-indikator kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas dalam rangka mendorong terwujudnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam periode Tahun Anggaran 2023.
2. Mendorong BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan kinerja.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan penerima manfaat atas kinerja yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengembangan kompetensi ASN.

1.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui teknik *focused group discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar dalam

merumuskan isu strategis, yang kemudian diadakan pembobotan terhadap isu-isu terpilih. Isu-isu itu pun sudah diuji melalui beberapa tolok ukur, diantaranya : aktualitas (seberapa besar isu menjadi pusat perhatian), problematik (seberapa kompleks isu tersebut membutuhkan upaya penyelesaian), kekhlayakan (seberapa besar dampak yang ditimbulkan isu apabila tidak diselesaikan) dan layak (seberapa sesuai isu dengan tugas pokok dan fungsi). Melihat dari gambaran pelayanan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah maka dapat ditentukan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur di Jawa Tengah. Dari hasil pembobotan terhadap isu-isu tersebut, maka dipilihlah isu-isu strategis sebagai berikut :

1. *Disruption Era* (V.U.C.A) Dunia telah memasuki era VUCA yang penuh ketidakpastian (salah satu kondisi VUCA saat ini adalah pandemi Covid-19). Kebijakan pengembangan kompetensi di era new normal, yaitu: *learning management system*, pengembangan bangkom secara terintegrasi. Pengembangan Kompetensi didorong untuk mencapai tujuan organisasi, Bukan hanya sekedar memenuhi hak pegawai.
2. Peran *Corporate University (Corpu)* Dalam Strategi Pengembangan Kompetensi. Mengidentifikasi, menilai dan mengembangkan pengetahuan, keahlian Rencana Strategis (Renstra) serta kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Sehingga organisasi dapat beradaptasi lebih cepat menghadapi dinamika perubahan, menuntut organisasi menjadi *agile* dan memiliki *learning culture*. Memastikan keberlangsungan ketersediaan talent dengan membantu pegawai mengembangkan potensinya sebagai sebagai penerus posisi penting, sehingga regenerasi terjamin.
3. Transformasi Paradigma Pengembangan Kompetensi. Transformasi dari *Training and Development* ke *In Learning Development*. Transformasi pembelajaran digital efektivitas pembelajaran dan efisiensi anggaran. Metode *e-learning*, *blended learning*, *distance learning* sebagai satu metode pembelajaran menjadi semakin dibutuhkan pada saat dunia dihadapkan pada situasi wabah pandemi covid.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditentukan jumlah Anggaran Pengembangan Kompetensi sebesar 0,34% dari APBD Provinsi. Yang mana diketahui bahwa pelatihan yang bersifat klasikal tentu membutuhkan banyak biaya, sementara pemerintah memiliki anggaran yang terbatas. Yaitu dengan

Inovasi Variasi Pengembangan Kompetensi sesuai dengan Per LAN 10 Tahun 2018, serta Kelengkapan Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi khususnya yang terkait dengan Teknologi Informasi untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan secara *e learning*, *blended learning*, *distance learning* dll.

5. Birokrasi Berkelas Dunia Menuju *SMART* ASN 2024. Pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan visi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dalam visi tersebut, pengembangan ASN menjadi salah satu prioritas kerja. SDM aparatur yang bekerja keras, melayani masyarakat, dinamis, terampil serta memiliki kemampuan dalam penguasaan IPTEK, hal ini menjadi dasar untuk mewujudkan ASN berkelas dunia pada tahun 2024.

1.3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1.3.1. Mandat Kinerja

Tabel 1.1

CASCADING BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

CASCADING PERUBAHAN BPSDMD												
TUJUAN	Mewujudkan ASN yang Kompeten Menjalankan Tugas Jabatan											
	IK: Persentase ASN yang Kompeten Menjalankan Tugas Jabatan											
SASARAN	Meningkatnya kompetensi ASN											Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN
	<i>IK: Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</i>											IK: Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS			KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL			KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL			KABID SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU		KABID SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU

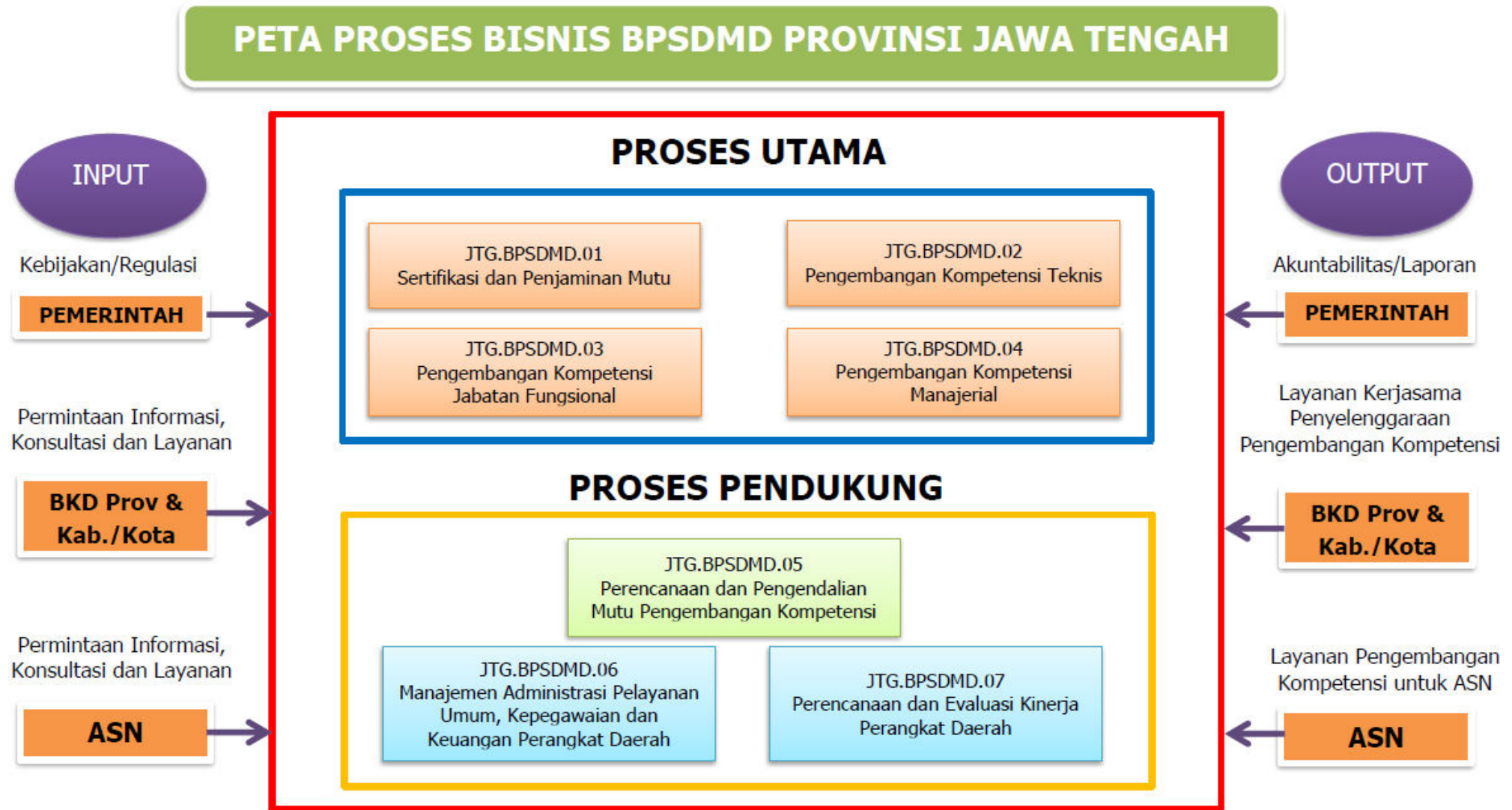
		<i>Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis</i>			<i>Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional</i>			<i>Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial</i> <i>Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS</i>			<i>Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti</i> <i>Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan</i>		<i>Persentase PNS yang lulus uji kompetensi</i>
KEGIATAN		Pengembangan Kompetensi Teknis	KEGIATAN	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		KEGIATAN	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		KEGIATAN	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengembangan Kompetensi Teknis		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
		<i>Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis</i>		<i>Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional</i>			<i>Jumlah Peserta pengembangan kompetensi manajerial</i>			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi</i>		<i>Jumlah Dokumen Kelembagaan & Sertifikasi Kompetensi</i>
							<i>Jumlah Peserta Latsar CPNS</i>			<i>Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi</i>	<i>Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi</i>		
										<i>Jumlah Dokumen Kelembagaan Pengembangan Kompetensi</i>			

SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	SUB KEGIATAN	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SUB KEGIATAN	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
	KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM		KASUBBID PELATIHAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL		KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS DAN PRAJABATAN		KASUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	KASUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI		KASUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI
	<i>Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum</i>		<i>Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional</i>		<i>Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS</i>		<i>Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan</i>	<i>Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan</i>		<i>Jumlah Kualifikasi Asektor kompetensi yang dimiliki</i>
	KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI		KASUBBID PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL		<i>Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas</i>		<i>Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi</i>	<i>Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi</i>		<i>Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan</i>

	<i>Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti</i>		<i>Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional</i>		<i>Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial</i>	SUB KEGIATAN	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN		KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL		SUBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR		KASUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI	KASUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI		KASUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI
	<i>Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan</i>		<i>Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional</i>		<i>Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator</i>		KASUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	KASUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA		<i>Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi</i>
					<i>Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama</i>		<i>Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan</i>	<i>Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan</i>		
					KASUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH		<i>Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan</i>	<i>Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan</i>		

								<i>Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pimpinan daerah</i>	SUB KEGIATAN	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
										KASUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA	KASUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA		
										<i>Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan</i>		
										<i>Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi</i>	<i>Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi</i>		
									SUB KEGIATAN	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar			
										KASUBBID PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI			
										KASUBBID PENGENDALIAN MUTU DAN KERJASAMA			
										<i>Jumlah pelatihan yang diakreditasi</i>			
										<i>Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>			
										<i>Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu</i>			

1.3.2. Peta Proses Bisnis



Gambar 1 . 1 PETA PROSES BISNIS BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam Peta Proses Bisnis, telah digambarkan alur kerja setiap unit kerja pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung tercapainya Tujuan Organisasi. Selain itu unsur stakeholder juga terlibat dalam peta proses bisnis dikarenakan pengembangan kompetensi merupakan hal kompleks yang menuntut keterlibatan pihak eksternal untuk pemetaan jumlah ASN termasuk kesenjangan kompetensi yang dimiliki, pendataan jumlah pengembangan kompetensi yang dilakukan seluruh OPD termasuk usulan jenis pelatihan pada Si Jari AKPK dan sebagainya.

1.3.3. Struktur Organisasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah. Tugas tersebut menyiratkan sebuah tanggung jawab yang semakin luas, bukan lagi sekedar penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya perubahan nomenklatur seperti tersebut diatas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai "*Problem Solving*" di Provinsi Jawa Tengah dengan mencetak alumni-alumni pelatihan yang kompeten dalam mewujudkan ASN Ber-AKHLAK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas "Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah".

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sumber daya

manusia ASN;

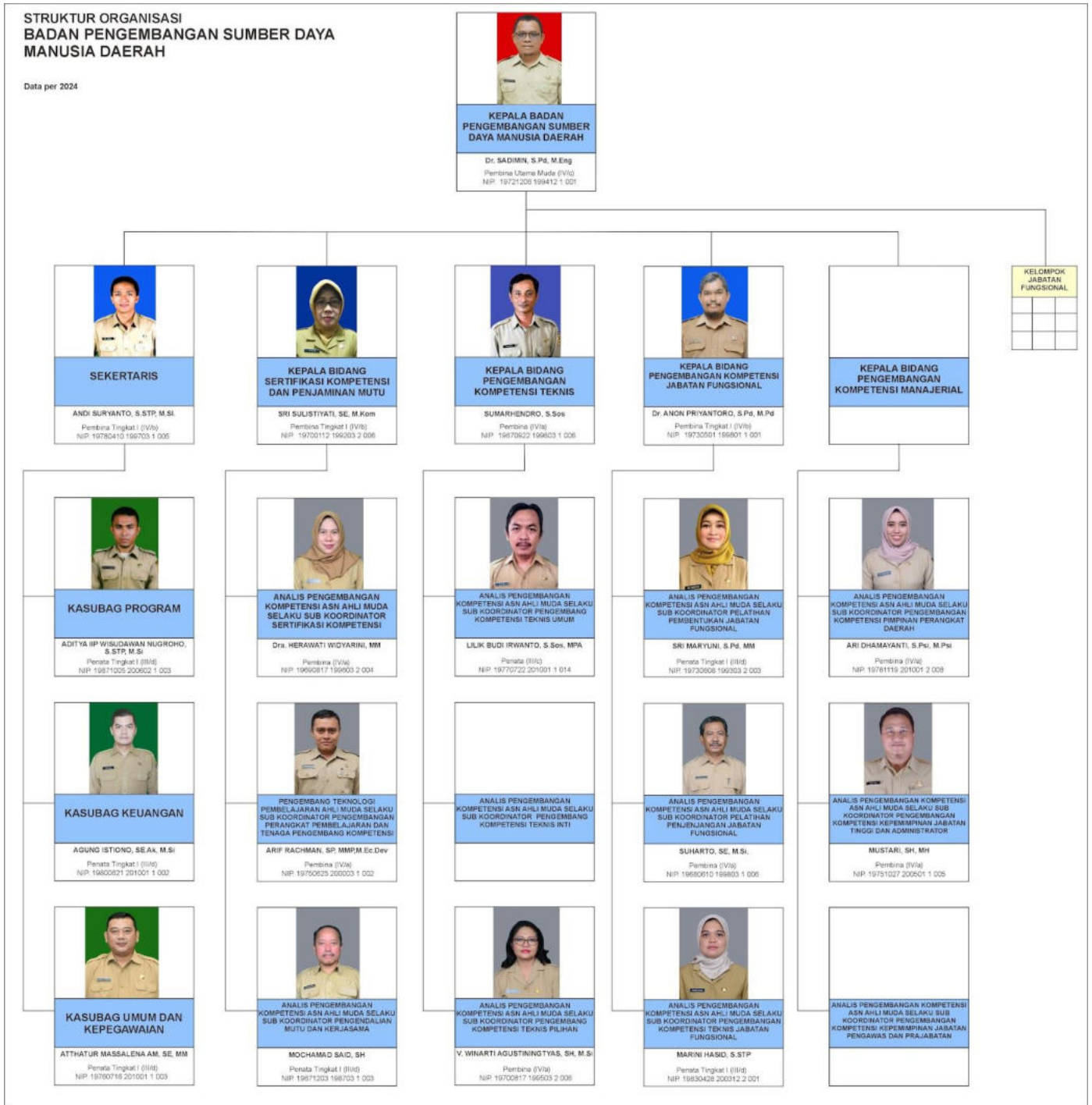
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia ASN;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi seperti tersebut diatas, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan sampai kepada jenjang berada di bawahnya sebagai unsur pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. Susunan organisasi dan tata kerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah memiliki komposisi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu;
4. Bidang pengembangan Kompetensi Teknis;
5. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional;
6. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1. 2 STRUKTUR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan Sumber Daya Manusia yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data per Januari 2024, sebanyak 184 orang pegawai, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

DATA PEGAWAI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Struktural	8
2	Fungsional Umum	75
3	Widyaiswara	50
4	Pengembang Teknologi Pembelajaran	1
5	Analisis Pengembangan Kompetensi	9
6	Pustakawan	1
7	Arsiparis	1
8	Pranata Komputer	1
9	Non ASN	38
JUMLAH		184

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN, selain didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah juga didukung dengan adanya Fasilitas (Sarana dan Prasarana) yang sangat memadai. Fasilitas tersebut terdiri dari sarana dan prasarana utama, serta sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai Penyelenggara Kegiatan Pelatihan. Fasilitas Sarana dan Prasarana yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, secara lebih rinci akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3

DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

NO	GEDUNG/RUANG	JUMLAH	KAPASITAS
1	Balai SASANA WIDYA PRAJA	1 Unit	500 Orang
2	Aula MURIA	1 Unit	300 Orang

NO	GEDUNG/RUANG	JUMLAH	KAPASITAS
3	Gedung Pendidikan Eksekutif MERAPI	1 Unit	190 Orang
4	Gedung Pendidikan SINDORO	1 Unit	400 Orang
5	Gedung Pendidikan MERBABU	1 Unit	400 Orang
6	Gedung Pendidikan MURIA	1 Unit	80 Orang
7	Gedung Pendidikan SUMBING I	1 Unit	320 Orang
8	Gedung Pendidikan SUMBING II	1 Unit	230 Orang
9	Asrama SINDORO I, II, dan III	3 Unit	336 Orang
10	Asrama MURIA I dan II	2 Unit	76 Orang
11	Asrama SUMBING I, II, III, dan IV	4 Unit	308 Orang
12	Asrama Eksekutif MERAPI	1 Unit	100 Orang
JUMLAH		18 Unit	3.240 Orang

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Tabel 1.4

SARAN / REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Dalam penyusunan PK agar berpedoman pada cascading yang telah ditetapkan	Perjanjian Kinerja yang disusun telah berpedoman kepada cascading yang telah ditetapkan
2.	Untuk membuat pakta integritas pada jajaran eselon III, Eselon IV dan Staf	Pakta Integritas pada jajaran eselon III, Eselon IV dan Staf akan di proses, selama ini Pakta Integritas dibuat untuk Eselon II
3	Menindaklanjuti rekomendasi LKjIP Tahun 2021, 2022 pada BAB IV untuk perbaikan capaian kinerja tahun yang akan datang	Peningkatan capaian kinerja secara optimal dicapai melalui metode pengembangan kompetensi secara virtual, blended dan MOOC
4	Memberikan reward dan punishment kepada seluruh unit kerja terhadap capaian kinerja	Terkait rewards, telah diberikan kepada ASN yang berperan dalam mendukung kinerja masing-masing unit kerjanya namun belum diukur menggunakan LKj dan Kinerja Individu.

1.7. Langkah Perbaikan Internal OPD

Tabel 1.5

TINDAK LANJUT/RENCANA AKSI SARAN REKOMENDASI PADA LKJIP TAHUN SEBELUMNYA

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Provinsi Jawa Tengah, dengan melibatkan Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan analisis kebutuhan di instansi masing-masing	Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing instansi, telah dilaksanakan melalui sistem sijari AKPK yang diinput oleh setiap individu ASN
2.	Mengidentifikasi kebutuhan kurikulum pelatihan, serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Pasca Pandemi Covid 19 dengan berkoordinasi dengan instansi Pusat/Pembina dan Bidang Penyelenggara Pelatihan	Kurikulum disusun sesuai kebutuhan dan senantiasa berkoordinasi dengan instansi Pembina untuk penyelenggaraan Pelatihan di era pasca pandemi <i>Covid 19</i> , sehingga penyelenggaraan pelatihan dapat berjalan dengan optimal
3	Memperhatikan perubahan kebijakan dari Instansi Pusat/Pembina terkait dengan Pengembangan Kompetensi	Setiap perubahan kebijakan dalam pengembangan kompetensi ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi Pembina/pusat dan apabila dibutuhkan dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran
4	Penataan jadwal pelatihan secara detail, baik bagi pihak internal maupun eksternal	Penataan jadwal pelatihan dikoordinasikan Bidang Serkom dan Penjaminan Mutu, selain itu di awal tahun dilakukan sosialisasi Pengembangan Kompetensi dengan seluruh OPD, Kabupaten/Kota dan unsur Akademisi di Jawa Tengah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok fungsinya sebagai Badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan daerah yang tentu saja mempunyai Rencana Strategis yang mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur. Adapun visi, misi dan tujuan serta sasaran tersebut adalah **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari** "*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*" sesuai misi ke 2 Gubernur yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah kabupaten/Kota.

Adapun keberhasilan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran akan dijelaskan lebih rinci dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan ASN yang Kompeten Menjalankan Tugas Jabatan		Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	79,29	84,29	89,29	94,29	99,29
		1.1	Meningkatnya Kompetensi ASN	35,01	35,03	35,05	35,92	36,26
		1.2	Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN	10	15	20	25	30
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	78,00	80,00	80,20	80,5	81
		2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	78,00	79,00	80,00	81,00	81,50
		2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	72	72,5	72,6	72,7	72,8

Sumber : Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang harus dicapai oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2023 yang merupakan akhir dari masa Renstra tahun 2018-2023 dijelaskan lebih rinci dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
**KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA,
 SATUAN DAN TARGET
 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan ASN yang Kompeten Menjalankan Tugas Jabatan.		Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.	%	99
	1.1	Meningkatnya Kompetensi ASN	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	30
	1.2	Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	36
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat.	%	81
	2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat.	Nilai	82
	2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP BPSDMD (Target Tahun 2023 disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya, melalui persetujuan dari TAPD dikarenakan melihat potensi pada tahun sebelumnya yang sudah melampaui target)	Nilai	81

Terdapat perbedaan target dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2023 dikarenakan Renstra 2018-2023 disusun pada Tahun 2018 sehingga target Rencana Kinerja Tahun 2023 telah disesuaikan terutama berubahnya pola pelaksanaan pengembangan kompetensi masa pandemi *Covid-19* yang dilaksanakan secara virtual sehingga capaian peserta lebih banyak dibandingkan pola klasikal.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Perjanjian Kinerja mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang mengikat dalam hal kinerja guna memastikan bahwa penugasan dari pimpinan dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh penerima amanah. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*Reward and Punishment*);
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, serta segala sumber daya yang dimiliki. Sehingga dalam Perjanjian Kinerja terdapat Indikator Kinerja sebagai salah satu tolok ukur dalam menghitung tingkat keberhasilan atas tercapainya sasaran strategis yang dibuat.

Selain perjanjian kerja antara Kepala Daerah dan Kepala SKPD, perjanjian kinerja juga dibuat sebagai penugasan dari pimpinan instansi tertinggi kepada pimpinan di level di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pengukuran Keterkaitan Perjanjian kinerja sasaran dilakukan berdasar pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis telah dijelaskan pada tabel diatas, dengan capaian sebagaimana tersaji pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3

**KETERKAITAN PERJANJIAN KINERJA
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tujuan : Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai Standar	%	99,29
	Sasaran : ➢ Meningkatnya kompetensi ASN ➢ Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN	➢ Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya ➢ Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	% %	30 36
2	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	81
	Sasaran : ➢ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ➢ Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	➢ Nilai Kepuasan Masyarakat ➢ Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Nilai Nilai	82 81

Sebagai wujud penugasan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program dengan kegiatannya yang didukung APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 76.990.934.000,- adapun rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
**KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Administrasi Keuangan ➢ Administrasi Barang ➢ Administrasi Pendapatan Daerah ➢ Administrasi Kepegawaian ➢ Administrasi Umum ➢ Pengadaan Barang ➢ Penyediaan Jasa Penunjang ➢ Pemeliharaan Barang 	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %	Rp. 50.515.186.000,-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %	Rp. 457.000.000,-
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase perencanaan Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	82%	Rp. 22.616.618.000,-
			Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan	3,50	
			Persentase PNS yang lulus Uji Kompetensi	93.17 %	
			Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	100 %	
			Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	100 %	
			Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial	100 %	
		➢ Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	Rp. 3.402.130.000,-
	JUMLAH				Rp. 76.990.934.000

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN, menerapkan prinsip "*TECHNO TRAINING CENTER*", yaitu penyelenggaraan pelatihan ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dengan memanfaatkan sebuah portal aplikasi yang diberi nama SIMAPAN SDM. Di dalam portal aplikasi tersebut terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi ini didukung dengan beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

- SiJari AKPK : Sistem Informasi Jaringan Online Analisis Kebutuhan Diklat

2. PERENCANAAN

- TRUST (Training Schedule System): informasi penjadwalan diklat
- Pak WI : pelayanan administrasi kegiatan widyaiswara
- RENATA : Sistem Informasi Rencana Kerja Dan Kegiatan
- SIMITRA : Sistem Informasi Kemitraan

3. PELAKSANAAN

- Registrasi/pendaftaran online : sistem pendaftaran peserta diklat
- SIP Tenan : Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN
- MOOC (Massive Open Online Course)
- CoE (Center of Excellence) : Inovasi & Rencana Tindak Lanjut
- Infografis (aplikasi informasi data sektoral bpsdmd provinsi jawa tengah)
- E-library : perpustakaan digital (hanya bisa diakses di jaringan kantor / intranet)
- SIMONIKA : Sistem Informasi Kurikulum Kediklatan
- Sifika : Sistem Informasi Kepegawaian BPSDMD
- e-Jurnal : Jurnal kedikalatan

4. EVALUASI

- Evaluasi Online : sistem evaluasi online untuk tenaga pengajar

5. PELAYANAN PUBLIK

- Web Portal Utama
- Web PPID
- SINTA : Sistem Informasi Kedatangan Tamu
- E-Sewa : Sistem Informasi Penyewaan Gedung
- E-Publik : Sistem Informasi Pelayanan Publik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Dari sisi akuntabilitas, capaian kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : $\geq 100\%$;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50 – 64,99%;
- e. Sangat Kurang : $\leq 50\%$.

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 DAN TARGET AKHIR RPJMD

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir Rpjmd
				Target	Realisasi	Persentase	
I.	TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.	%	99,29%	127,16%	128,07%	99,29%
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	%	30%	52,53%	175,10 %	30%
	SASARAN 2 : Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.	%	36,26%	40,33%	111,22%	36,26%
II.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	angka	81	86,65	106,98%	81
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	angka	81,50	89	109,20%	81,50
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	angka	81	84,30	104,07%	72,80

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta tahun ini;

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
I.	TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.	99,29%	127,16%	128,07%	Sangat Baik	Econtrolling.jatengprov.go.id
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	30%	52,53%	175,10 %	Sangat Baik	Econtrolling.jatengprov.go.id
	SASARAN 2 : Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.	36,26%	40,33%	111,22%	Sangat Baik	Econtrolling.jatengprov.go.id
II.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	81	86,65	106,98%	Sangat Baik	Econtrolling.jatengprov.go.id
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	81,50	89	109,20%	Sangat Baik	Econtrolling.jatengprov.go.id
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	81	84,30	104,07%	Sangat Baik	Econtrolling.jatengprov.go.id

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (selama 5 tahun);

Tabel 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019-2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
I.	TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.	79,29%	77,85%	98,18%	84,29%	82,87%	98,32%	89,29%	93,22%	104,40%	94,29%	125,60%	133,2%	99,29%	127,16%	128,07%
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	10%	10,79%	107,90%	15,00%	15,66%	104,40%	20,00%	25,36%	126,80%	25%	50,97%	203,88%	30%	52,53%	175,1%
	SASARAN 2 : Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.	35,01%	35,22%	100,60%	35,03%	35,42%	101,11%	35,05%	36,36%	103,74%	35,92%	38,19%	106,32%	36,26%	40,33%	111,22%
II.	TUJUAN 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	78,00%	78,00%	100,00%	80,00%	80,06%	100,08%	80,20%	81,88%	102,09%	80,5%	85,53%	107,48%	81%	88,65%	106,97%
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	78	78,13	100,17%	79,00	83,12	105,22%	80,00	83,12	103,90%	81	87,75	108,33%	81,5	89	109,2%
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	72	76	105,56%	72,50	77,01	106,22%	72,60	80,64	111,07%	80,64	83,3	103,3%	81	84,3	104,07%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR TAHUN 2023
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
I.	TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.	128,07%	99,29%	Sangat baik
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	175,10 %	30%	Sangat baik
	SASARAN 2 : Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.	111,22%	36,26%	Sangat baik
II.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	106,98%	81	Sangat baik
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	109,20%	81,50	Sangat baik
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	104,07%	72,80	Sangat baik

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 3.5
ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
I.	TUJUAN 1 : MEWUJUDKAN ASN YANG KOMPETEN MENJALANKAN TUGAS JABATAN	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar.	99,29%	127,16%	128,07%	Sangat baik	Tidak ada dikarenakan capaian di atas 100%
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya.	30%	52,53%	175,10 %	Sangat baik	Tidak ada dikarenakan capaian di atas 100%
	SASARAN 2 : Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	Presentase ASN yang tersertifikasi kompetensinya.	36,26%	40,33%	111,22%	Sangat baik	Tidak ada dikarenakan capaian di atas 100%
II.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	81	86,65	106,98%	Sangat baik	Tidak ada dikarenakan capaian di atas 100%
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Nilai Kepuasan Masyarakat.	81,50	89	109,20%	Sangat baik	Tidak ada dikarenakan capaian di atas 100%
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	81	84,30	104,07%	Sangat baik	Tidak ada dikarenakan capaian di atas 100%

Tujuan dan sasaran capaian realisasi rata-rata diatas 100% dari target yang telah ditetapkan sehingga tidak diperlukan solusi.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel 3.6

**PENGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN/KEUANGAN
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

No	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	TUJUAN 1 : Mewujudkan Asn Yang Kompeten Menjalankan Tugas Jabatan	99,29 %	127,16 %	128,07%	Rp 26.018.748.000	Rp 24.403.238.260	93,79%	Sangat efisien
	SASARAN 1: Meningkatnya Kompetensi ASN.	30,00 %	52,53 %	175,1%	Rp 13.334.538.000	Rp. 10.552.162.426	79,13%	Sangat efisien
	SASARAN 2 : Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	36,26 %	40,33 %	111,22%	Rp 582.000.000	Rp 572.045.401	98%	Sangat efisien
2.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	81 %	86,65 %	106,97 %	Rp 50.972.186.000	Rp 47.181.023.149	92,56%	Sangat efisien
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	81,50 %	89,0 %	109,20 %	Rp 50.515.186.000	Rp. 46.731.513.193	92,51%	Sangat efisien
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	81,0 %	84,3 %	104,07 %	Rp 457.000.000	Rp. 449.509.956	98,36%	Sangat efisien
	RATA-RATA			108,66%			86,37%	

Efisiensi capaian anggaran BPSDMD masuk kategori sangat efisien dikarenakan dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 86,37% mampu mencapai hasil sangat optimal di rata-rata capaian kinerja sebesar 108,66%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
DENGAN TARGET TAHUN 2021
BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Tujuan/ Sasaran	Target	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1.	TUJUAN 1 : Mewujudkan ASN Yang Kompeten Menjalankan Tugas Jabatan	30,00 %	52,53 %	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembang n Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	120 %	menunjang
					SASARAN 1: Meningkatnya Kompetensi ASN.		
					2. Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	154,64 %	menunjang
					3. Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurn akan	100 %	menunjang
					4. Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengemb. Kompetensi	100 %	menunjang
					5. Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurn akan	210 %	menunjang
					6. Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	260 %	menunjang
		30,00 %	52,53 %	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembang n Kompetensi Manajerial dan Fungsional	7. Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	100 %	menunjang
					8. Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	200 %	menunjang
					9. Jumlah pelatihan yang diakreditasi	100 %	menunjang
					10. Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurn akan	200 %	menunjang
					11. Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	100 %	menunjang
				12. Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	114,58 %	menunjang	

No	Tujuan/ Sasaran	Target	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					13. Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	100 %	menunjang
					14. Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	100 %	menunjang
					15. Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial	100 %	menunjang
					16. Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pimda	12.180 %	menunjang
					17. Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	123,41 %	menunjang
					18. Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	123,26 %	menunjang
					19. Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	120 %	menunjang
	SASARAN 2 : Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN.	36,26 %	40,33 %	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Jumlah kualifikasi asesor kompetensi yang dimiliki	100 %	menunjang
					2. Jumlah skema sertifikasi yang dilaksanakan	100 %	menunjang
					3. Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	474 %	menunjang
2.	TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	81 %	86,65 %				
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	81,50 %	89,0 %	Administrasi Keuangan	1. Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	100 %	menunjang
				Administrasi Umum	2. Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	100 %	menunjang
					3. Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	100 %	menunjang
					4. Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	100 %	menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Target	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					5. Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	menunjang
					6. Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100 %	menunjang
					7. Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	100 %	menunjang
					8. Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	100 %	menunjang
					9. Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	100 %	menunjang
					10. Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	100 %	menunjang
					11. Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	100 %	menunjang
					12. Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	100 %	menunjang
				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/B intek/Seminar	100 %	menunjang
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	81,0 %	84,3 %	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	menunjang
					2. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	menunjang

3.2. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel 2.4.8

REALISASI ANGGARAN BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.972.186.000	47.181.023.149	90,73
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	457.000.000	449.509.956	98,36
	Administrasi Keuangan	32.947.036.000	29.488.089.349	89,5
	Administrasi Umum	200.000.000	198.738.165	99,37
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	118.174.000	115.625.500	97,84
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	232.210.000	225.990.978	97,32
	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.994.844.000	2.942.611.301	98,26
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.189.900.000	1.110.441.482	93,32

3.1 INOVASI

Sehubungan dengan tugas fungsi lembaga pelatihan terakreditasi, secara cepat dan menyeluruh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah berinovasi menciptakan sebuah metode pembelajaran yang murah dan mudah untuk menjangkau kegiatan pengembangan kompetensi seluruh ASN di Jawa Tengah. Proses penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi ASN secara klasikal atau tatap muka sudah secara perlahan mulai ditinggalkan diganti dengan metode *blended* dan *elearning*, sebagai tindak lanjut dalam menghadapi situasi yang sedemikian rupa, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara daring atau online yang disebut (*Massive Online Open Courses*) atau lebih dikenal dengan MOOC pada Tahun 2023.

Menyikapi adanya pergeseran paradigma pengembangan kompetensi dari sistem klasikal menjadi e-learning atau distance learning, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian dan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi. Mulai dari penguatan sarana dan prasarana pelatihan

Gambar 3. 1 SIMAPAN SDM SEBAGAI BENTUK INOVASI

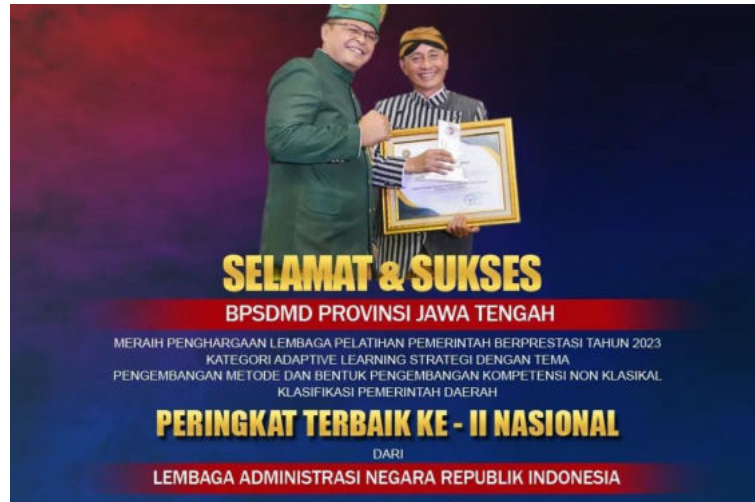


jarak jauh, hingga pemanfaatan aplikasi online dalam pembelajaran selama pelatihan berlangsung. Pemanfaatan sistem pelatihan secara online tersebut sebenarnya sudah mulai diterapkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan di tahun 2019 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan pelatihan dengan sistem full e-learning di beberapa pelatihan. Sistem utama yang digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah "SIMAPAN SDM" (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan SDM) yang merupakan sistem elektronik terintegrasi yang diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan pelatihan serta menyajikan data sektoral tentang pelatihan yang akurat dan real time.

3.2 PENGHARGAAN

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan tugas pokok fungsinya terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam urusan pendidikan dan pelatihan dengan akreditasi dan sertifikasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima atas pelayanan dalam pengembangan kompetensi untuk ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan yang diperoleh antara lain :

Gambar 3 . 2 Menerima penghargaan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi kategori bintang 1 dari (LAN-RI)



Gambar 3 . 3 Pencapaian standar ISO 21001:2018 pada tanggal 11 Oktober 2023 oleh Lembaga akreditasi TUV Nord



Gambar 3 . 4 Juara kedua tingkat nasional Kategori Adaptive Learning Strategy Dengan Tema “Pengembangan Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Klasifikasi Pemerintah Daerah” oleh LAN-RI



Gambar 3 . 5 Penghargaan sebagai lembaga pendidikan yang bekerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan akselerasi pelatihan struktural kepemimpinan pegawai (PKA/PKP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi oleh Kemenkumhak RI



Gambar 3 . 6 Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik Awards Tahun 2023 kategori Informatif Dalam Menyampaikan, Menyediakan, dan Menguasai Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dengan memperhatikan pembahasan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka bisa disebutkan bahwa BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil capaian kinerja sesuai dengan realisasi target indikator tujuan dan sasaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Kesimpulan terhadap hasil kinerja tersebut didukung oleh data-data sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran pencapaian Sasaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kompetensi ASN" dengan realisasi sebesar 52,53% telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 30%.
 - b. Sasaran Strategis "Meningkatnya Penjaminan Kompetensi ASN" dengan realisasi 40,33%, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 36,26%.
 - c. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah" nilai realisasinya sebesar 89 dari target 81,50 yang artinya telah melebihi dari target yang ditetapkan.
 - d. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", realisasinya sebesar 84,30 dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 81.
2. Realisasi Anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2023 sebesar Rp. **71.584.261.409,-** atau **92,98%** dari total alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

4.2. REKOMENDASI

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar lebih baik di masa mendatang, antara lain :

1. Mengoptimalkan peran Jawa Tengah Corporate University dalam akselerasi pengembangan kompetensi di Jawa Tengah, sehingga dapat menjadi *problem solving* dalam permasalahan organisasi.
2. Senantiasa menindaklanjuti perubahan kebijakan dari Instansi Pusat/Pembina terkait dengan Pengembangan Kompetensi terkini.
3. Dilakukan sosialisasi Pengembangan Kompetensi BPSDMD secara menyeluruh kepada seluruh stakeholder Pentahelix, sehingga capaian kinerja BPSDMD dapat berjalan secara optimal khususnya pemenuhan 20 JP ASN.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ini disusun, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja kelembagaan di tahun mendatang.



KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
BPSDMD

Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

LAMPIRAN



Jawa Tengah
**CORPORATE
UNIVERSITY**

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. NANA SUDJANA, MM
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua,
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

Drs. NANA SUDJANA, MM

Pihak pertama,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

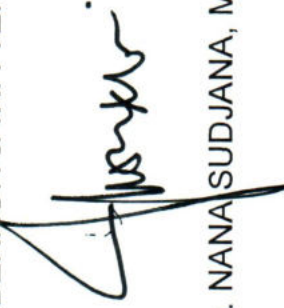
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan			
1	Mewujudkan ASN yang kompeten menjalankan tugas jabatan	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi Sesuai Standar	99,29 %
Sasaran			
1.1	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	30 %
1.2	Meningkatnya penjaminan kompetensi ASN	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	36.26 %
Tujuan			
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai 81
Sasaran			
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai 81,5
2.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Nilai 83,3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp. 26.018.748.000	APBD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 50.972.186.000	APBD

Semarang, 06 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH



Drs. NANA SUDJANA, MM

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.
Jabatan : Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Jabatan : Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah


selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Rp 50.515.186.000,-	APBD
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Rp 457.000.000,-	APBD

Semarang, 06 November 2023

Pihak Pertama,
SEKRETARIS



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. SADIAMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA IIP W.N, S.STP, M.Si
Jabatan : KASUBBAG PROGRAM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.
Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Semarang, 06 November 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG PROGRAM


ADITYA IIP W.N, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198710052006021003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	10 Dok
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Dok

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.616.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.384.000	APBD

Pihak kedua,
SEKRETARIS



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Semarang, 06 November 2023

Pihak pertama,
KASUBBAG PROGRAM



ADITYA IIP W.N, S.STP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 198710052006021003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG ISTIONO,SE.Ak,M.Si

JABATAN : KEPALA SUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI SURYANTO,S.STP,M.Si

JABATAN : SEKRETARIS BPSDMD PROV. JATENG


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang , 06 November 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO,S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG KEUANGAN


AGUNG ISTIONO,SE.Ak,M.S.i
Penata
NIP. 19800621 201001 1 022

PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kegiatan Administrasi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD 5. Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. 6. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN 2. Jumlah terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN. 3. Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi Keuangan 4. Jumlah Dokumen Laporan Akutansi Perangkat Daerah 5. Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan yang disusun. 6. Jumlah laporan keuanganbulanan/triwulanan/semesteran Perangkat daerah yang disusun 	<ol style="list-style-type: none"> 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
2	Kegiatan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	27.679.000.000	APBDP
2.	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.927.730.000	APBDP
3.	Jumlah terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.876.000	APBDP
4.	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi Keuangan Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	71.699.000	APBDP
5.	Jumlah Dokumen Laporan Akutansi Perangkat Daerah Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.	73.100.000	APBDP
6.	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan keuangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	125.631.000	APBDP
7.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah	118.174.000	APBDP

Semarang, 06 November 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG KEUANGAN


AGUNG ISTIONO, SE.AK.M.Si
Penata

NIP. 19800621 201001 1 022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19780410 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ATTHATHUR MASSALENA AM, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19760716 201001 1 003

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19780410 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO (1)	KEGIATAN (2)	SUB KEGIATAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET (5)
A	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan
B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	27 Orang
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan kantor	85 Unit
			Jumlah unit penyediaan perlengkapan kantor	6028 Unit
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah	12 Bulan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	12 Bulan
		Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	4 Dokumen

		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin	9 Unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	19 Unit
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit pengadaan aset tetap	1 paket
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik perangkat daerah	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala dan pajak kendaraan dinas operasional	12 Bulan
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya aset tetap lainnya	12 bulan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang direhab	44 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana gedung kantor	12 Bulan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	APBD Perubahan
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	78.100.000	APBD Perubahan
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	154.110.000	APBD Perubahan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	145.077.000	APBD Perubahan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.117.710.000	APBD Perubahan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	424.165.000	APBD Perubahan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	292.600.000	APBD Perubahan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.938.000	APBD Perubahan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000	APBD Perubahan
		Fasilitas Kunjungan Tamu	105.500.000	APBD Perubahan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.220.000	APBD Perubahan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.505.000	APBD Perubahan
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	416.129.000	APBD Perubahan
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	864.400.000	APBD Perubahan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.500.000	APBD Perubahan

	Pengadaan aset tetap lainnya	15.000.000	APBD Perubahan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	APBD Perubahan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.501.000.000	APBD Perubahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.479.300.000	APBD Perubahan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.750.000	APBD Perubahan
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000	APBD Perubahan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.587.220.000	APBD Perubahan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.109.252.000	APBD Perubahan

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ATTATHUR MASSALENA AM, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19760716 201001 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI SULISTİYATI, SE., M.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Jabatan : KEPALA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU**


SRI SULISTİYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006


**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan	82%
		Persentase PNS yang lulus Uji Kompetensi	3,5
			93,17%


No	Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Rp. 1.308.407.000,-	APBDP
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 300.132.000,-	APBDP

Semarang, 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH**


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
 -Pembina Utama Muda
 NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
 PENJAMINAN MUTU**


SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700112 199203 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD SAID, SH

Jabatan : ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN AHLI MUDA

MOCHAMAD SAID, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19671203 198703 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pasca	16 Dok
			Jumlah Pengembangan Kompetensi yang dievaluasi	115 Angk
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Pedoman Teknis yang disusun/disempurnakan	1 Dok
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Standar Mutu	1 Dok
			Jumlah Pelatihan yang Terakreditasi	2 Jenis
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pasca	12 Dok
			Jumlah Pengembangan Kompetensi yang	22 Angk

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p>	<p>dievaluasi</p> <p>Jumlah Pedoman Teknis yang disusun/disempurnakan</p>	1 Dok

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	<p>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p> <p>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional</p> <p>Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar</p>	Rp. 283.764.000,-	APBD
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis	<p>Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p>	Rp. 41.068.000,-	APBD

	<p>Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</p>	Rp. 7.814.000,-	APBD
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
 PENJAMINAN MUTU**



SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
 AHLI MUDA**



MOCHAMAD SAID, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19671203 198703 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF RACHMAN, SP, MPP, M.Ec.Dev

Jabatan : PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SULISTİYATI, SE., M.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

SRI SULISTİYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
PENGEMBANG TEKNOLOGI
PEMBELAJARAN AHLI MUDA

ARIF RACHMAN, SP, MPP, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19750625 200003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan Metode	1 Dok
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	10 Dok
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Tenaga Pengembangan Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang
2	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan Metode	1 Dok
			Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	36 OPD
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	30 Dok

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Rp. 64.429.000,-	APBDP
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Rp. 125.905.000,-	APBDP
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Rp. 84.955.000,-	APBDP
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 43.050.000,-	APBDP
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 208.200.000,-	APBDP

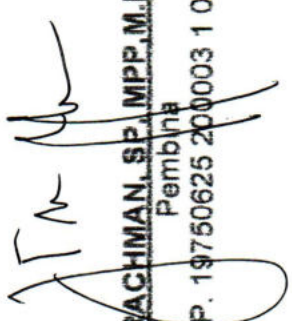
Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
 PENJAMINAN MUTU**



SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA



ARIF RACHMAN, SP, MPP, M.Ec.Dev
 Pembina
 NIP. 19750625 200003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM

Jabatan : ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI SULISTYATI, SE., M.Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
PENJAMINAN MUTU

SRI SULISTYATI, SE., M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN AHLI MUDA

Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM
Pembina
NIP. 19690817 199603 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	150 Orang
		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Asesor Kompetensi yang dimiliki	5 Orang
			Jumlah Sertifikasi Skema yang dilaksanakan	5 Jenis

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi dan Manajerial dan Fungsional	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rp. 482.000.000,-	APBDP
		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Rp. 100.000.000,-	APBDP

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG
 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN
 PENJAMINAN MUTU**



SRI SULISTIYATI, SE., M.Kom
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700112 199203 2 006

Pihak Pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 ASN AHLI MUDA**



Dra. HERAWATI WIDYARINI, MM
 Pembina
 NIP. 19690817 199603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARHENDRO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah


selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIK


SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670922 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 3.402.130.000	APBD
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis		

Semarang, November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670922 199803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VW. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si
Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda
selaku Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARHENDRO, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670922 199803 1 006

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS PILIHAN

VW. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19700817 199503 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	740 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Rp 989.030.000	APBD

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS**


SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina

NIP. 19670922 199803 1 006

Pihak Pertama,
**SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN**


VW. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si
Pembina

NIP. 19700817 199503 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda
selaku Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARHENDRO, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670922 199803 1 006

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS UMUM

LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19770722 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	1.080 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Rp 1.098.800.000	APBD

Semarang, 06 November 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM




SUMARHENDRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19670922 199803 1 006

LILIK BUDI IRWANTO, S.Sos, MPA
Penata Tingkat I
NIP. 19770722 201001 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023


Pihak kedua

Pihak pertama

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100 %

Program

1 Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi jabatan fungsional

Rp. 3.654.902.000,-


APBD

Anggaran

Keterangan

Pihak kedua


KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Dr. SADIIMIN, S.Pd, M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

Semarang, 06 November 2023

Pihak pertama

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI MARYUNI, S.Pd, MM

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI MUDA

SRI MARYUNI, S.Pd, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19730608 199303 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	2.220 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Rp. 1.908.365.000,-	APBD Perubahan
		1. Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional		

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I
 NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 AHLI MUDA



SRI MARYUNI, S.Pd, MM

Penata Tingkat I
 NIP. 19730608 199303 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARTO, SE, M.Si
Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

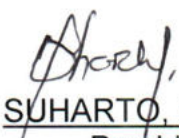
Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI MUDA


SUHARTO, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19680610 199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	340 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional	Rp. 1.185.104.000,-	APBD Perubahan
		1. Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional		

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

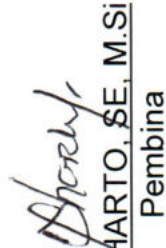
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI MUDA


SUHARTO, SE, M.Si
Pembina

NIP. 19680610 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARINI HASID, S.STP, MM

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI MUDA

MARINI HASID, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19830428 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	460 orang

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	Rp. 1.119.316.000,-	APBD Perubahan
		1. Jumlah peserta pelatihan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional		Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Dr. ANON PRIYANTORO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 19730501 199801 1 001

Pihak pertama

ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
AHLI MUDA



MARINI HASID, S.STP, MM

Penata Tingkat I
NIP. 19830428 200312 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andik Arif Asyafi'i, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng


Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, ~~06~~ November 2023

Pihak kedua,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


DR. SADIMIN, S.PD, M.ENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL


ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19651109 198703 1 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Mnajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1. Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS 2. Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial	100% 100%

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

1. Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS
2. Persentase ASN yang lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial

Anggaran

- Rp 5.132.785.000,-
- Rp 11.668.505.000,-

Keterangan

- APBD – P
- APBD – P

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua,

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721206 199412 1 001

Pihak pertama,
 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI MANAJERIAL

ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP 19651109 198703 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustari, SH, MH

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andik Arif Asyafi'i, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, ~~06~~ November 2023

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL

ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 196511091987031010

Pihak pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN AHLI MUDA

MUSTARI, SH, MH
Pembina
NIP. 197510272005011005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	280 orang 180 orang

Sub Kegiatan

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1. | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator | Rp 4.322.290.000,- | APBD – P |
| 2. | Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama | Rp. 3.776.550.000,- | APBD - P |

Anggaran

Keterangan

Semarang, 06 November 2023

Pihak kedua,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL**


ANDIKARIF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 196511091987031010

Pihak pertama,
**ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
ASN/AHLI MUDA**


MUSTARI, SH, MH
Pembina
NIP. 197510272005011005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 201 A Semarang Kode Pos : 50263
Telepon. 024-7473701 Faksimile 024-7473701 Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Dhamayanti, M.Psi

Jabatan : Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andik Arif Asyafi'i, SH, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, ~~26~~ November 2023



Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL


ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19651109 198703 1 010

Pihak pertama,
ANALIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN AHLI MUDA


ARI DHAMAYANTI, M.Psi
Pembina
NIP 19781119 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pemda	350 orang
Sub Kegiatan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pemda		Anggaran	Keterangan
			Rp. 358.215.000,-	APBD - P
	Pihak kedua, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL		Semarang, 06 November 2023	Pihak pertama, ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI MUDA
	<u>ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM</u> Pembina Tingkat I NIP 19651109 198703 1 010	 <u>ARI DHAMAYANTI, M.Psi</u> Pembina NIP 19781119 201001 2 008		